

## **Strategi Adaptasi: Kisah Desa Kawa dan Desa Morodemak dalam Menghadapi Perubahan Populasi dan Ekologi**

### *Adaptation Strategies: Tales From Kawa Village and Morodemak Village in Facing Population and Ecological Changes*

**Widhyanto Muttaqien<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM - Institut Pertanian Bogor,  
Jalan Raya Pajajaran, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 16127, Indonesia;

\*Penulis korespondensi. *e-mail*: red.sinau@gmail.com

(Diterima: 22 Februari 2018; Disetujui: 11 Mei 2018)

#### **ABSTRACT**

*Population growth in coastal areas, especially as a result of migration, has put pressure on the environment, both the built environment and the community management environment in implementing sustainable livelihood strategies. This paper wishes to explain two models of community adaptation in two distinct areas, namely Morodemak Village on the north coast of Central Java, which began to recede in the management of common resources, and Kawa Village in Seram Barat coast, which is still strong in maintaining the tradition of coastal and terrestrial territorial management as a common resource. The research methodology used in this research is qualitative approach, with semi structured interview and focus group discussion. From the results of the study, it was revealed that people were able to reshape their resources based on ecological and social changes, as their adaptation strategy in sustaining sustainable livelihoods.*

*Keywords: adaptation strategy, ecological change, migration pattern, sustainable livelihood*

#### **ABSTRAK**

Pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir, terutama sebagai akibat dari migrasi, telah memberi tekanan pada lingkungan, baik lingkungan binaan maupun lingkungan pengelolaan masyarakat dalam menerapkan strategi penghidupan yang berkelanjutan. Makalah ini ingin menjelaskan dua model adaptasi masyarakat di dua wilayah berbeda, yaitu Desa Morodemak di pantai utara Jawa Tengah yang mulai surut dalam pengelolaan sumber daya bersama, dan Desa Kawa di pantai Seram Barat yang masih kuat dalam mempertahankan tradisi pengelolaan wilayah pesisir dan terestrial sebagai sumber daya umum. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan wawancara semi terstruktur dan diskusi kelompok terarah. Dari hasil penelitian terungkap bahwa orang mampu membentuk kembali sumber daya mereka berdasarkan perubahan ekologi dan sosial, sebagai strategi adaptasi mereka dalam mempertahankan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Kata kunci: perubahan ekologi, pola migrasi, strategi adaptasi, sumberdaya bersama penghidupan berkelanjutan

## PENDAHULUAN

### Permasalahan

Persoalan keterbatasan lahan dan penyusutan sumber daya alam merupakan faktor pendorong dalam perubahan mata pencaharian dan penghidupan berkelanjutan di kawasan pesisir. Perubahan ini mendorong pada perubahan lainnya, yaitu pola-pola migrasi, serta adaptasi terhadap perubahan lanskap sosial-budaya. Sementara potret umum masyarakat nelayan adalah kemiskinan (Nurcahyanti *et al.*, 2010) dan kekumuhan dalam permukiman (Haryono, 2007; Kusnadi, 2000).

Dalam konteks eksploitasi sumber daya perikanan, nelayan memiliki perilaku sebagai berikut; (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumber daya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut, kurangnya pengetahuan (Woodward and Colin-Castilo, 2015; D.S. Adhuri *et al.*, 2016); (3) mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti *trawl* atau *minitrawl*; serta (4) mengeksploitasi sumber daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2009).

Perubahan ekologi di Desa Morodemak, dimulai dengan program tambak rakyat, yaitu bandeng dan udang sekitar tahun 1980. Tren konversi lahan dari kawasan lindung berupa hutan bakau menjadi tambak terus meningkat seiring keuntungan finansial yang diberikan oleh

usaha tambak, sampai terjadi penurunan produksi yang diakibatkan oleh penyakit pada udang dan bandeng, yang menurut masyarakat disebabkan oleh 'air kotor' yang diperkirakan disebabkan karena deforestasi bakau dan sampah domestik yang memengaruhi kualitas air untuk tambak. Deforestasi kawasan Mangrove disebabkan oleh penggunaan batang bakau untuk kayu bakar.

Kawasan bakau yang menjadi habitat kepiting lumpur (*Scylla serrata*) yang dianggap hama bagi petambak. Kepiting ini merugikan karena merusak pematang tambak sehingga menyebabkan kebocoran-kebocoran pada dinding tambak akibat lubang yang dibuatnya. Kebocoran tersebut dapat menyebabkan lepasnya bandeng melalui lubang tersebut.

Sekitar tahun 2000-an, masyarakat mulai disadarkan dengan kondisi ini dan mulai melakukan penanaman kembali hutan Mangrove mereka. Hasilnya, menurut masyarakat telah dirasakan dengan membaiknya kembali usaha tambak bandeng dan udang, serta munculnya rajungan dan kepiting dalam jumlah cukup banyak.

Perubahan lanskap ekologi di kawasan Desa Kawa tidak berjalan masif. Hal ini disebabkan masih terjaganya status Kenegerian Kawa sebagai pemangku adat yang mengelola wilayah adat Negeri Kawa. Secara adat suku asal disebut sebagai 'orang adat' dan pendatang disebut 'penghuni adat'. Para pendatang diperbolehkan memiliki lahan dan mengusahakan permukiman dan perkebunan, namun kepemilikan lahan dibatasi setelah peristiwa konflik agama tahun 1999 hingga 2007. Dalam Kanas *et al.*, (2017)<sup>1</sup> disebutkan bahwa dalam konflik Ambon rasa tidak aman akan kehilangan pekerjaan karena kehadiran kelompok lain di luar kelompoknya. Kekhawatiran lainnya adalah hilangnya kebiasaan, adat, dan tradisi ketika kelompok lain

<sup>1</sup> Potensi konflik di Maluku telah berlangsung lama, sejak jaman Belanda, dimana masyarakat Maluku yang mayoritas Kristen mendapatkan privelese dari pemerintah Belanda dalam administrasi dan kependudukan, dan tiba-tiba terjadi perubahan sejak jaman Orde Baru, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan rentan dengan perubahan populasi.

Rasa tidak aman ini sebagai ancaman tak nyata menjadi nyata ketika pemerintahan Orde baru berakhir tahun 1998 dan masing-masing kelompok terus membangun persepsi negatif terhadap kelompok lainnya.

mendominasi. Ini terjadi dalam relasi di dalam kelompok maupun antar kelompok.

Sedangkan orang adat masih memiliki wilayah kelola adat yang terbagi atas kepemilikan bersama (*common property*) dengan pembagian berdasarkan marga, kepemilikan pribadi (*private property*) dan kepemilikan negara (*state property*). Raja Negeri Kawa menilai beberapa kawasan lindung yang ada termasuk sebagian hutan Mangrove adalah milik negara.

Perubahan ekologi di Desa Kawa, terkait komoditas yang ditanam dimulai dari maraknya tanaman coklat yang mengganti kebun kelapa dan kebun campur yang terdiri dari jeruk kunci, kelapa, rambutan, mangga, durian, cengkeh, kopi, cempedak, nangka. Komoditas coklat diperkenalkan lebih banyak oleh pendatang dari Buton, dengan pola tanam dalam satu hamparan.

Sementara orang adat menanam coklat dalam kebun campur mereka. Hanya cengkeh yang ditanam dalam satu hamparan. Orang adat masih mempertahankan dusun sagu (hutan sagu) mereka.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana model adaptasi di dua tempat, khususnya nelayan dalam menghadapi tekanan perubahan ekologi dan pertumbuhan populasi.

## LATAR TEORI DAN METODOLOGI

Berbagai teori tentang kemiskinan melihat masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang rentan dengan perubahan kondisi alam, baik dalam cadangan (*stock, provision*) maupun dalam aliran dan distribusi pemanfaatannya (*flow*). Dalam Ostrom (2006) disebutkan masalah pengguna (*appropriator*) dalam sumber daya bersama (*common pool resources*) adalah pemanfaatan yang paling efisien antar-pengguna. Masalah ini dipengaruhi oleh (1) eksternalitas penggunaan, yaitu relasi produksi antar-pengguna, artinya jika salah satu pengguna memaksimalkan produksinya (dalam penangkapan) maka pengguna lain akan kehilangan kesempatan yang sama; (2) permasalahan lokasi, dalam konteks spasial sumber daya bersama memiliki 'tempat' atau

'petak/kantong' (*patch*), 'lokasi' potensi sumber daya yang berbeda. Ada daerah penangkapan yang banyak ikannya, ada yang tidak, hal ini menimbulkan permasalahan penempatan (*assignment problem*); (3) eksternalitas teknologi yaitu penggunaan teknologi penangkapan yang homogen akan menimbulkan kesempatan yang sama pada setiap nelayan, sebaliknya penggunaan teknologi yang berbeda akan meningkatkan biaya pada nelayan lainnya atau pada nelayan pengguna teknologi tersebut.

Kedua, masalah pencadangan yaitu permasalahan bagaimana sumber daya dalam konteks penawaran dan permintaan dilangsungkan. Dalam sisi penawaran maka bagaimana produksi sumber daya dihasilkan dan dirawat. Sedangkan dari sisi permintaan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, berapa kapasitas produksi yang menguntungkan atau mengapa orang berkecenderungan memaksimalkan "nilai sekarang" (*net present value*).

Dalam tulisan ini, penekanan terhadap sumber daya bersama di kedua desa, menjadi titik perhatian yang memengaruhi proses adaptasi dan penemuan kembali wilayah-wilayah (*domain*) baru dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Di sisi lain Fabinyi (2018) menjelaskan bahwa permasalahan pemanfaatan sumber daya alam juga berhubungan dengan apa yang perebutan ruang lewat teknologi. Dengan meminjam teori *spatio temporal fixity*, Fabinyi menjelaskan bahwa dominasi teknologi dapat 'memperluas geografi' dan memenangkan persaingan lewat alat produksi. Mengambil contoh di Mindoro, Filipina, tesis Fabinyi bersesuaian dengan apa yang dimaksud Harvey (1989, 2010) sebagai ekspansi geografis dari surplus kapital, dalam konteks ini Fabinyi melihat para pemodal telah berhasil melakukan ekspansi lewat program *aquaculture* melalui intensifikasi perikanan, sementara masyarakat sekitar malah meninggalkan basis pertanian dan bermigrasi keluar (*out migration*).

Untuk mengatasi keterbatasan dan penyusutan sumber daya, nelayan beradaptasi sesuai dengan kondisi sosial, seperti pengaturan

sosial, pengaturan pemanfaatan sumber daya dan kondisi biofisik serta perubahan lanskap ekologi mereka. Pengaturan sosial sangat bergantung pada karakteristik budaya masyarakat bersangkutan yang melekat dalam tubuh sosial dan individu sebagai strategi penyintasan (Hardesty, 1977).

Dari sisi antropologi ekologi, adaptasi didefinisikan sebagai suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya untuk mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial (Alland Jr, 1975). Sedangkan Sahlin (1968) memandang adaptasi sebagai kapasitas manusia untuk memaksimalkan kesempatan hidupnya. Lewat kemampuannya memodifikasi norma sosial, politik, kebiasaan untuk melakukan antisipasi, pengurangan risiko, memanfaatkan peluang yang ada, menyesuaikan diri terhadap perubahan, memitigasi potensi bencana, dan berdaya pulih (McCarthy *et al.*, 2001; (Magis, 2010).

Strategi adaptasi berkembang ke arah manusia sebagai subjek yang mampu mengoptimalkan asetnya untuk menjawab kekurangan analisa terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan serta intervensi sosial yang dibutuhkan.

Pendekatan penghidupan berkelanjutan merupakan salah satu strategi adaptasi yang menghubungkan individu dengan asetnya, yang dikenal sebagai pentagon aset, yaitu aset manusia, sosial, ekonomi, fisik, dan alam. Kelima aset ini menciptakan keberlanjutan ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Ashley & Carney, 1999). Ellis, (2000) menghubungkan pentagon aset ini dengan karakteristik sistem nafkah di daerah perdesaan yang dibagi menjadi tiga, yaitu (1) berbasis pendapatan pertanian milik sendiri (*farm income*); (2) pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian bukan milik sendiri (*off farm income*) seperti buruh tani pada saat panen komoditas tertentu; (3) Pendapatan berbasis bukan pertanian (*non farm income*) seperti menukang, perdagangan umum, remiten dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan lain-lain.

Diagram *Pentagon Asset* dibentuk melalui beberapa tahapan. (1) mencari kategori aset yang penting bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan; (2) menyesuaikan kategori aset menurut masyarakat dengan pentagon aset dalam teori; (3) melakukan penilaian partisipatif terhadap kepemilikan aset berdasarkan status ekonomi dan sosial atau kelas sosial; (4) mengolah hasil penilaian ke dalam bentuk grafik; (5) mempresentasikan hasil dalam bentuk grafik kepada masyarakat untuk memperkaya narasi.

Penelitian ini merupakan sebagian dari penelitian riset aksi tentang perbaikan perkampungan nelayan di 10 Provinsi. Pemilihan lokasi pada tulisan ini dibatasi dua lokasi dengan argumentasi untuk memperlihatkan distingsi pemanfaatan sumber daya berbasis sumber daya bersama dengan sumber daya privat.

Tulisan ini menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara semi terstruktur dan diskusi terarah. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan metode triangulasi responden yang membagi responden berdasarkan tingkat kemiskinan. Jumlah responden untuk wawancara ada 15 orang di tiap desa. Pemilihan responden menggunakan informasi dari informan. Untuk Desa Kawa informannya adalah Kepala Adat, dan perwakilan penghuni adat dari suku Buton. Sedangkan untuk Desa Morodemak yang berlaku sebagai informan adalah 3 orang tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk sejarah desa.

Sedangkan jumlah peserta untuk diskusi terarah sebanyak 30 orang di tiap desa berdasarkan kategori pemanfaat sumber daya dan gender. Lama waktu penelitian di tiap desa satu minggu. Dilanjutkan dengan wawancara lewat telepon kepada beberapa informan untuk verifikasi data.

### **Profil Desa Kawa**

Desa Kawa (dikenal dengan sebutan Kenegerian Kawa, dengan kepala adat yang disebut Raja) merupakan salah satu Desa di kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten

Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Jarak Dusun Kawa dengan Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat  $\pm$  30 km. Secara administratif Desa Kawa berbatasan di bagian utara dengan Laut Seram, bagian selatan dengan Teluk Piru, bagian timur dengan Dusun Pelita Jaya, dan bagian barat dengan Selat Buano.

Desa Kawa memiliki kontour datar dengan pantai yang beragam, mulai dari pantai berbatu dan curam, sampai pantai yang berhutan Mangrove. Hutan Mangrove sebagai vegetasi tepi pantai masih baik kondisinya di dusun ini. Disamping ini juga dijumpai beberapa tanaman produksi terutama berbentuk pohon di halaman mereka seperti kelapa dan beberapa pohon buah lokal.

Kebun campur masyarakat terdapat di luar wilayah permukiman, yang dimiliki oleh orang adat dan penghuni adat. Orang adat masih memiliki dusun sagu.

Di Negeri Kawa terdapat 5 dusun yaitu Kawa, Waeyoho, Pohon Batu, Patinea, dan Waetoso dengan pusat desa berada di Kawa. Dusun dengan kondisi seratus persen adalah nelayan yaitu Waeyoho dan Pohon Batu. Dusun Kawa sebagian besar merupakan petani sedangkan jumlah nelayannya lebih sedikit dari dusun Waeyoho dan Pohon Batu. Dusun Patinea meskipun berada di wilayah Negeri Kawa tetapi secara adat bukan bagian Negeri Kawa karena merupakan masyarakat yang bermigrasi dari negeri lain. Dusun Waetoso merupakan dusun termuda yang berpenduduk sebagai petani sawah beretnis Jawa melalui program transmigrasi.

Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) dan jumlah nelayan di Dusun Kawa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk di Desa Kawa

No	Kriteria Penduduk	Jumlah	Jumlah Penduduk	
1.	Total Penduduk	Jumlah	2,090	Jiwa
2.	Kepala Keluarga	Tangga	530	KK
3.	Rumah Perikanan	Tangga	215	RTP
4.	Jenis Pencaharian (Nelayan)	Mata	180	Jiwa

## Profil Nelayan

Dusun Kawa memiliki jumlah nelayan yang lebih sedikit dibandingkan dusun lain, terutama dusun Waeyoho dan Pohon Batu, yang merupakan pendatang dari Buton. Dusun Kawa dihuni oleh Orang Adat (suku asli) sementara dusun Waeyoho dan Pohon Batu dihuni oleh nelayan dari Buton. Dalam Adhuri (2016) tiga suku Buton, Bugis, Makassar (dikenal dengan singkatan BBM) adalah kelompok-kelompok nelayan yang mobilitasnya tertinggi di kawasan Timur Indonesia dan memiliki tingkat penerimaan cukup tinggi di kalangan penduduk asli.

Di Kawa dan Waeyoho untuk pemasaran hasil perikanan, terdapat pengumpul ikan. Khusus untuk Waeyoho selain memasarkan hasil tangkapan melalui pengumpul di dusun, mereka juga sering langsung memasarkan hasil tangkapan di Ambon. Sebagian besar tangkapan nelayan Waeyoho adalah komoditas ekspor Korea dan Jepang. Nelayan di Pohon Batu umumnya nelayan teri yang menjual teri segar dan kering kepada pengumpul di Pulau Osi untuk dijual kembali di Surabaya.

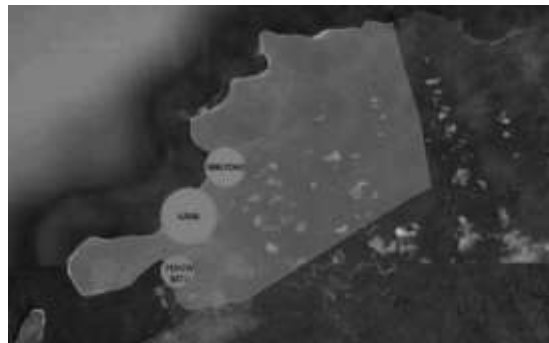
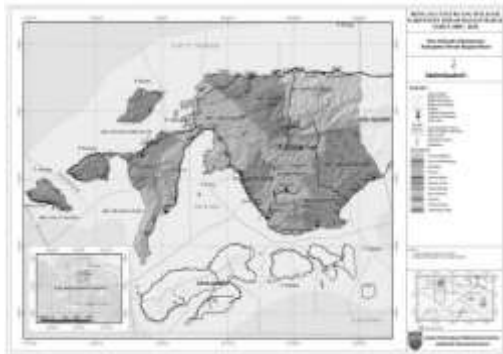
*Sasi laut* merupakan aturan adat dari Etnis Kawa yang memanjang dari Waeyoho sampai Kawa. Aturan ini dibuat untuk melestarikan ikan di laut. Diberlakukan larangan menangkap ikan pada radius 100 hingga 400 m dari pesisir dalam kurun 1 sampai 2 tahun sampai *sasi* dibuka. Tujuannya untuk membiarkan ikan-ikan berkembang terlebih dahulu agar hasil tangkapan tetap banyak. Apabila melanggar maka akan dikenakan denda. *Sasi laut* dibuka hanya selama 1 bulan. Waktu *sasi laut* ditentukan atas persetujuan raja.

## Sumber nafkah dan Diversifikasi Usaha

Sumber nafkah dan diversifikasi usaha telah dilaksanakan oleh nelayan di Dusun Kawa yang umumnya masih bersifat usaha skala rumah tangga yang kegiatan usahanya hanya melibatkan anggota keluarga maupun tetangga di lingkup Dusun Kawa.

Kegiatan *on farm* terdiri dari penangkapan ikan, udang, dan kepiting. Sedangkan kegiatan *off farm* meliputi (1) kegiatan diversifikasi loin ikan tuna dan kegiatan diversifikasi ikan asap (2) buruh petik saat panen cengkeh di Desa Kawa

dan desa-desa sekitar Kecamatan Piru. Sedangkan kegiatan *non farm* di Desa Kawa meliputi perdagangan, buruh bangunan, sopir angkutan umum.



Peta 1. Lokasi kajian Desa Kawa

### Desa Morodemak

Posisi geografis desa Morodemak berada pada 110032'40" BT dan 6049'30" LS. Wilayah Tri Desa Morodemak berada di wilayah muara Sungai Tuntang, terdiri dari areal pertambakan serta areal hijau berupa hutan Mangrove.

Hutan Mangrove sebagai sabuk hijau yang membatasi wilayah permukiman dan tambak mulai ditanam kembali tahun 2000-an dalam kondisi cukup baik. Pertambahan penduduk telah mengurangi luasan hutan Mangrove untuk permukiman dan tambak.

Kondisi permukiman sangat padat, hampir tidak ada pohon besar di wilayah ini kecuali di pinggir anak Sungai Tuntang. Di desa sekitarnya, Margolinduk dan Purworejo.

Sungai Tuntang mengalami pendangkalan sehingga aliran anak sungai dari permukiman warga terhambat dan rob atau air pasang menjadi bencana banjir bulanan.

Berdasarkan aspek sejarah, Desa Morodemak (428,362 ha) merupakan cikal bakal dari pengembangan desa yang berkembang menjadi Desa Margolinduk (85.94 ha) dan Desa Purworejo (840 ha). Ketiga desa tersebut disebut sebagai *Tri Desa Morodemak*. Konektivitas tiga desa tersebut terutama disatukan oleh kegiatan perikanan yang sejak dulu kala mereka lakukan secara bersama-sama di wilayah muara Sungai Tuntang.

Jumlah penduduk di Tri Desa Morodemak pada tahun 2013 yaitu 21,992 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 10,864 jiwa dan penduduk perempuan 11,128 jiwa.

Tabel 2. Jumlah penduduk Tri Desa Morodemak 2013

Desa	Penduduk		Jumlah (Jiwa)
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
Morodemak	3,509	3,579	7,088
Margolinduk	2,475	2,758	5,233
Purworejo	4,880	4,791	9,671
Total Penduduk	10,864	11,128	21,992

### Profil Nelayan

Sebagian besar penduduk Tri Desa Morodemak berprofesi sebagai nelayan tradisional dengan *trip one day fishing* (bolak balik dalam satu hari). Terdapat dua tipe nelayan

di Morodemak yaitu nelayan murni dan nelayan ikutan (ABK). Selain nelayan, masyarakat setempat banyak yang berprofesi sebagai penambak. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai pegawai dan pedagang.

Status kepemilikan sarana penangkapan ikan milik pribadi dengan ukuran kapal rata-rata 20 GT dengan alat tangkap kursin dan cakalang. Hampir semua nelayan memiliki kapal motor tempel sendiri dan memiliki dimensi kapal yang relatif menengah hingga besar. Terdapat pembagian kerja yang melibatkan pekerja dari wilayah Tri Desa Morodemak hingga desa tetangga.

Berdasarkan wawancara, terdapat desa yang warganya berprofesi sebagai ABK. Desa tersebut adalah Desa Gebang yang berbatasan dengan Desa Margolinduk (Tri Desa Morodemak). Biasanya trip penangkapan ikan dilakukan satu kali sehari dengan 2 kali kegiatan melaut yaitu pada dini hari melakukan pemasangan bubu/jaring insang (*setting*) dan pada sore hari melakukan pengambilan hasil tangkapan (*hauling*). Adapun jenis hasil tangkapan dominan adalah teri, kembung, petek, kuningan, dan layur. Terdapat juga kepiting, bandeng, dan udang. Aktivitas perikanan tetap melibatkan (Pelabuhan Perikanan Pantai) Morodemak sebagai sentra perdagangan. Tri Desa Morodemak tetap memiliki ikatan yang erat dengan desa-desa nelayan lain di luar wilayah mereka.

Konflik yang terjadi di Desa Morodemak adalah konflik penggunaan alat tangkap. Konflik horizontal terjadi antar masyarakat yang

menggunakan alat tangkap *sero* dengan bagan, dan alat tangkap pancing dengan *arid* (jaring pukat). Sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang mengikuti aturan Peraturan Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*). Sebagian besar pengusaha pukat yang juga berkonflik dengan nelayan miskin, beralih kelebihan penangkapan tidak bisa cuma diatur untuk mereka, sedangkan pencurian ikan oleh nelayan asing dan negara dari wilayah lain (Tegal dan Indramayu) terus menerus terjadi di depan mata mereka.

**Sumber Nafkah dan Diversifikasi Usaha**

Diversifikasi usaha nelayan di bidang *on farm* selain menangkap ikan adalah petambak. Untuk kegiatan *off farm* masyarakat mengolah ikan (kerupuk ikan, abon ikan, terasi), ikan asin, buruh tambak. Sedangkan untuk kegiatan *non farm* sebagai pedagang, penyedia jasa penyeberangan, tukang bangunan, tukang bengkel kapal (*docking*), dan sebagainya. Di Tri Desa Morodemak kegiatan diversifikasi usaha, terutama bagi rumah tangga nelayan miskin belum berjalan dengan baik, disebabkan kendala pemasaran dan modal.



Peta 2. Desa Morodemak

## **POLA PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN**

### **Desa Kawa**

Masyarakat Desa Kawa membagi penghasilan mereka ke dalam skema harian dengan mata pencaharian ikan, bulanan dengan kebun coklat dan kopra, serta tanaman tahunan cengkeh. Pekarangan rumah ditanami tumbuhan kebutuhan sehari-hari, seperti rica, jeruk limau, tomat, terung, belimbing wuluh, mangga, singkong racun (untuk bahan baku *swami*, hanya untuk masyarakat Buton). Masyarakat asli Seram di Kenegerian Kawa ini juga masih memiliki dusun sagu, sekitar 5 km dari permukiman.

Sebagian masyarakat memiliki ternak sapi, dengan lahan penggembalaan yang sudah mereka bagi di sekitar sempadan sungai, dengan model sewa memakai teknik lelang atau undian (lelang dalam masyarakat Kawa juga berarti undian. Masyarakat yang belum pernah mendapatkan jatah ladang penggembalaan dapat giliran untuk diundi namanya, sementara yang pernah mendapatkan bisa menyewa dari yang memenangkan lelang).

Bahan makanan dari luar desa, antara lain adalah minyak sayur, bawang merah, bawang putih, beras. Pencetakan sawah telah dimulai di dusun Waetoso, yang diusahakan oleh transmigran dari Jawa. Bahan makanan dari dalam desa; aneka sayuran seperti rica, timun, kacang, umbi-umbian. Sedangkan sumber protein utama adalah ikan yang dikelola secara lestari.

### **Relasi produksi**

Relasi produksi di desa ini khususnya Desa Waeyoho dan Pondok Batu yang warganya keturunan Buton mengenal sistem patron klien dengan jaringan sampai ke kota Ambon dan daerah asal (P. Buton). Dusun Waeyoho penghasilan utama adalah ikan karang (kerapu) dan ikan pelagis (cakalang, tuna). Sedangkan untuk wilayah Pohon Batu, penghasilan utama kepiting, ikan karang.

Relasi produksi di Dusun Kawa, lebih didominasi sistem komunal dengan pembagian dan distribusi kekayaan diatur berdasarkan aturan adat, mulai dari lelang padang penggembalaan di darat, sasi darat untuk kebun pala dan cengkeh, kelapa, sagu. Dan *sasi* laut untuk perikanan tangkap, seperti; ikan karang, kepiting dan udang.

Perempuan di Dusun Kawa, Waeyoho, dan Pohon Batu juga membuat kopra. Kopra adalah komoditas dominan yang merupakan penghasil utama di desa ini.

### **Desa Morodemak**

Sistem mata pencarian masyarakat Morodemak pada umumnya adalah nelayan. Nelayan di desa ini terbagi menjadi dua yakni nelayan besar yang memiliki kapal sendiri dan nelayan ikutan atau yang biasa dikenal dengan sebutan ABK (anak buah kapal). Selain nelayan, nelayan tambak juga memiliki proporsi yang cukup besar di desa ini. Mata pencaharian sebagai pedagang dan penyedia jasa lainnya merupakan mata pencarian paling sedikit yang ditemukan di Tri Desa Morodemak.

Nelayan umumnya melaut saat musim angin timur yang ditandai dengan gelombang laut yang relatif tenang. Pada saat musim angin barat dengan gelombang laut yang tinggi masyarakat lebih banyak melakukan kegiatan lain seperti membenarkan perahu atau menjadi nelayan tambak. Pada umumnya nelayan menjalin hubungan dengan pengumpul ikan. Hasil tangkapan kemudian dibeli oleh pengumpul untuk selanjutnya dipasarkan ke tempat lain. Hubungan antara nelayan dan pengumpul sangat baik karena dihubungkan dengan ikatan kepercayaan. Hubungan ABK dengan pemilik kapal dalam hal ini nelayan utama juga demikian.

Penghasilan lain dari para nelayan di Tri Desa Morodemak adalah usaha tambak bandeng dan udang. Seperti yang disebutkan di atas, perubahan ekologi menyebabkan penurunan produksi tambak, sehingga masyarakat, terutama masyarakat miskin yang tidak berlahan tambak kesulitan untuk mendapatkan penghasilan lain, terutama dalam musim paceklik. Sebagian besar



usaha tambak kepemilikan lahannya mulai beralih dari masyarakat ke pengusaha asal Semarang dan Jakarta.

### Relasi produksi

Relasi produksi di desa ini ada berbagai jenis, yang biasa terjadi adalah hubungan syirkah/kongsi atau dalam bahasa lokal disebut *mbageni* dengan perbakalan. Perbakalan yang dimaksud adalah perdagangan toko (bekal melaut) dengan pembeli yaitu nelayan. Toko yang dimaksud menyediakan barang yang dibutuhkan.

Penentuan harga perbakalan ini memiliki beberapa skema, yaitu (1) ditentukan oleh

pemilik perahu sampan kecil, hal ini disebabkan karena modal untuk sampan kecil sedikit; (2) ditentukan oleh pemilik toko jika pemilik perahu sedang (motik) yang meminta hingga terjadi tawar menawar. Faktor lain dalam penentuan besarnya harga antara lain jumlah utang pemilik perahu kepada pihak toko; (3) ditentukan sepenuhnya oleh pemilik toko jika permintaan bakal dilakukan oleh pemilik perahu besar. Biasanya pemilik toko meminta pelunasan utang lama terlebih dahulu.

Jika dilihat dari pentagon sumber daya, maka kondisi aset-akses-aktivitas produksi dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Kondisi Aktual Aset-Akses dan Aktivitas Produksi

Faktor-faktor PB	Desa Morodemak	Desa Kawa
Kondisi Aset	<p>Alam Laut sebagai mata pencaharian utama</p> <p>Kawasan bakau sebagai budi daya tambak dan destinasi pariwisata</p> <p>Matahari sebagai alat pengering</p> <p>Kawasan tak terbangun (hutan bakau, empang, badan air) mencakup sekitar 90% wilayah desa.</p>	<p>Laut sebagai mata pencaharian utama dusun Waeyoho dan Pondok Batu</p> <p>Kawasan perkebunan dan hutan sebagai mata pencaharian utama dusun Kawa</p> <p>Kayu bakar untuk membakar dan mengasap ikan</p> <p>Kawasan tak terbangun (kebun, hutan adat, hutan Mangrove) mencakup sekitar 95% wilayah desa</p>
Fisik	<p>Alat tangkap modern, pukat, kursin, arat</p> <p>Alat tangkap tradisional, pancing, bubu untuk nelayan miskin</p> <p>Aktivitas pusat pelelangan ikan buatan pemerintah berfungsi</p> <p>Kondisi permukiman padat</p> <p>Kepemilikan kendaraan terutama motor dan mobil serta perahu</p> <p>Kepemilikan barang konsumsi seperti perlengkapan (perabot rumah) hampir rata</p>	<p>Alat tangkap tradisional untuk sebagian besar nelayan</p> <p>Alat tangkap tradisional, pancing, bubu</p> <p>Aktivitas tempat pelelangan ikan buatan pemerintah tidak berfungsi</p> <p>Kondisi permukiman nyaman, dengan pekarangan luas</p> <p>Kepemilikan kendaraan terutama motor dan perahu</p> <p>Kepemilikan barang konsumsi seperti perabotan rumah tidak merata</p>
Manusia	<p>Tingkat pendidikan tinggi SMA dan PT di kalangan generasi muda kelahiran 1990-an</p> <p>Terdapat berbagai pelatihan keterampilan rumah tangga nelayan</p>	<p>Tingkat pendidikan SMA di kalangan generasi muda kelahiran 1990-an</p> <p>Jarang terdapat peningkatan kapasitas rumah tangga nelayan</p>
Sosial	<p>Sistem kekerabatan (perkawinan) dan kebertetanggaannya, status ekonomi menentukan status sosial, kapasitas intelektual memengaruhi status sosial</p> <p>Gotong royong dalam kampung untuk kerja bakti di wilayah permukiman</p>	<p>Sistem kesukuan berdasarkan marga, status keturunan (raja) menentukan status ekonomi</p> <p>Komunalisme dan sumber daya milik bersama (<i>sasi</i> darat dan <i>sasi</i> laut)</p>

Tabel 4. Lanjutan

Faktor-faktor PB	Desa Morodemak	Desa Kawa
Finansial	<p>Modal diambil tabungan individu, sebagian besar nelayan miskin dan nelayan tambak</p> <p>Modal dari juragan kapal, dari Semarang dan Jakarta</p> <p>Perbakalan (<i>qiraadh</i>)</p> <p>Modal pinjaman Bank untuk pengusaha tambak</p> <p>Modal simpan pinjam perempuan untuk usaha industri rumah tangga</p>	<p>Modal sendiri untuk sebagian besar nelayan</p> <p>Juragan kapal, biasanya dilakukan oleh masyarakat Buton</p> <p>Pembeli ikan</p> <p>Perbankan, dimulai ketika komoditas coklat mulai tren</p>
Kondisi Akses	<p>Pemasaran tangkapan ke TPI</p> <p>Pemasaran ikan tambak (udang dan bandeng) ke Semarang</p> <p>Kondisi sarana dan prasarana perikanan mendukung</p> <p>Akses jalan ke kota kecamatan dan Kabupaten baik</p> <p>Transportasi umum banyak</p> <p>Sebagian besar masyarakat bergantung pada laut, akses terhadap sumber daya alam, terutama tambak terbatas karena lebih banyak kepemilikan privat</p> <p>Akses terhadap pengambilan keputusan hampir setara di semua kalangan masyarakat, musyawarah dilakukan secara rutin</p>	<p>Pemasaran hasil ikan laut, kepiting, ke Ambon</p> <p>Pemasaran ke Piru (kota kecamatan)</p> <p>Akses jalan ke ibukota kecamatan dan kabupaten baik</p> <p>Transportasi umum terbatas waktu dan jarang</p> <p>Akses terhadap sumber daya alam besar, diatur oleh desa</p> <p>Aktivitas melaut dan ladang bagi orang asli hampir sama</p> <p>Akses pengambilan keputusan bersifat elitis, dengan sistem perwakilan marga dan perangkat desa</p>
Aktivitas	<p>Ada pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam aktivitas nelayan</p> <p>Untuk keluarga ABK ada yang menjadi pekerja harian lepas pada tambak.</p> <p>Perempuan membuat ikan asin dan kerupuk ikan</p>	<p>Ada pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam aktivitas nelayan dan perkebunan</p> <p>Aktivitas domestik lebih banyak di Dusun Kawa dan Waeyaho untuk perempuan, sementara di Dusun Pondok Batu, perempuan menentukan harga lelang ikan</p> <p>Perempuan lebih dominan dalam pekerjaan kebun (membersihkan lahan), dan membuat kopra.</p>

### Desa Kawa

Desa Kawa memiliki pentagon aset produksi sebagai berikut, aset alam merupakan aset utama dari pentagon aset yang pengaturannya diatur secara komunal sebagai aset sosial. Kedua aset ini, terutama aset sosial telah menempatkan kelompok miskin dalam jaring pengaman sosial yang menyebabkan mereka berada dalam skema penghidupan berkelanjutan yang lestari dan sejahtera.

Dari sisi aset sumber daya keuangan, untuk Desa Kawa tidak memiliki struktur akses finansial yang timpang, kepemilikan lahan rata-

rata di desa adalah 2 hektar, yang ditanami kebun campur. Orang yang terkaya biasanya sekarang menanam coklat, baik pendatang maupun orang adat. Adanya dusun sagu dan kebun campur komunal menjadikan ketimpangan sosial kecil, karena masing-masing keluarga sesuai dengan marganya telah mendapatkan jatah dari adat.

Bagi penghuni adat (pendatang) kesulitan yang dialami sekarang adalah penambahan lahan, baik untuk permukiman maupun untuk perkebunan. Hal ini dialami terutama oleh dusun Pohon Batu, yang sebagian wilayahnya adalah wilayah lindung bakau dan pasang surut. Sedangkan daerah lahan kering subur yang

masih tersisa dari luas desa, seluas 350 hektar telah diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia<sup>2</sup>.

Bagi orang adat Kenegerian Kawa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini permasalahan aset dan akses lahan menjadi isu utama, mengingat permasalahan ini pun yang sering menjadi pemicu konflik dan dianggap menjadi penyebab kemunduran ekonomi orang adat. Perlindungan orang adat terhadap aset sumber daya alam ini menyebabkan ketimpangan antar masyarakat tidak besar di kalangan orang adat.

Permasalahan lahan yang dialami dusun lain seperti dusun Waeyoho adalah ekstensifikasi lahan perkebunan coklat. Sedangkan untuk Dusun Pohon Batu adalah luasan untuk wilayah permukiman.



Grafik 1. Kepemilikan Aset Penghidupan Berkelanjutan Desa Kawa

### Desa Morodemak

Desa Morodemak memiliki kepemilikan aset produksi sebagai berikut; sebanyak 60% responden memiliki lahan tambak. Selain sebagai petani tambak, mereka bekerja sebagai anak buah kapal. Dari sisi kepemilikan sumber daya lahan kelompok kaya sekurangnya memiliki lebih dari 2 ha tambak dan perahu yang

bisa disewakan. Sistem sewa tambak tergantung dari lokasi tambak, ada tambak yang dianggap sebagai lokasi yang tepat dilihat dari (1) ketersediaan saluran air untuk sirkulasi air tambak; (2) asal-usul lahan tambak, ada sebagian lahan yang muncul karena sedimentasi; (3) pengaruh hutan bakau dalam sebagai penghasil unsur hara dalam tambak. Harga lahan di lokasi terbaik dalam kisaran 30 juta per tahun, biasanya lahan tambak disewakan paling kurang 3 tahun.

Sedangkan kepemilikan aset produksi untuk golongan sedang, adalah kepemilikan perahu kecil atau sedang. Dengan kepemilikan tambak di bawah 2 hektar. Bagian terbesar masyarakat adalah nelayan tanpa aset produksi, baik tambak maupun perahu.

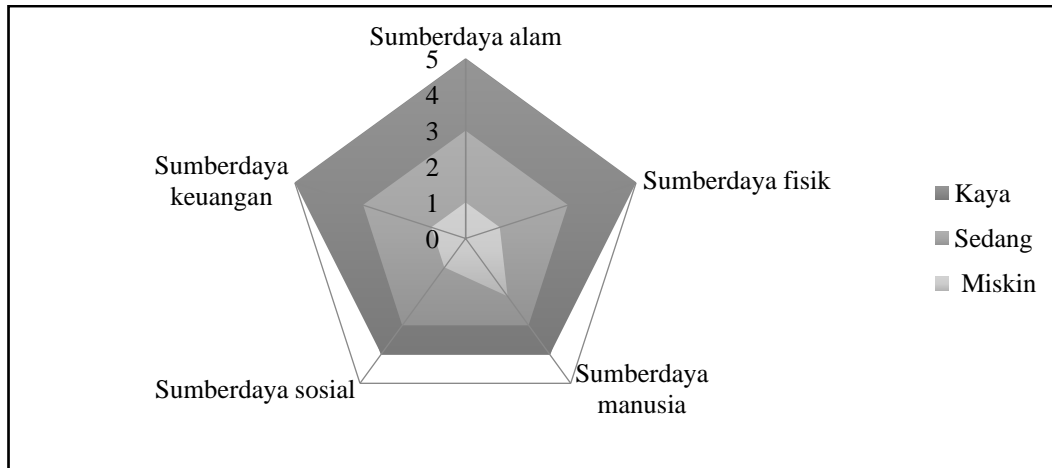
Dari sisi sumber daya manusia, kaum kaya berhasil menetaskan anaknya terutama generasi 1990-an untuk bersekolah sampai ke Perguruan Tinggi, sedangkan kaum paling miskin bersekolah sampai tingkat SMA. Sebagian besar masyarakat yang berstatus sedang, menyekolahkan anak mereka setelah lulus SMA di sekitar kota Demak untuk memenuhi kualifikasi pekerjaan di luar sektor perikanan tangkap dan tambak.

Dari sisi sosial, kaum kaya bisa mendapatkan akses melalui pengaruh kekayaan, namun sebagai desa yang masih memerhatikan nilai-nilai agama, status kaum terdidik, baik dalam hal agama, maupun pengetahuan umum bisa memengaruhi pilihan masyarakat dalam hal kepemimpinan. Akses terhadap pengambilan keputusan hampir sama pada setiap status kekayaan, musyawarah berjalan rutin, namun untuk kesempatan berorganisasi kebanyakan perempuan kaum miskin tidak sempat melakukan peningkatan kapasitas karena menjadi buruh lepas di tambak atau mencari penghasilan lain.

Secara ringkas gambaran hubungan pentagon aset Desa Morodemak digambarkan dalam Grafik 2 di bawah ini.

<sup>2</sup> Menurut La Hadia kepala dusun Pohon Batu, sekitar tahun 1985 terjadi proses penyerahan tanah kepada Kepolisian Republik Indonesia, dan setiap tahun masyarakat dijanjikan bisa mendaftar menjadi anggota Polri (saat itu

masih tergabung dengan TNI). Sejak proses penyerahan lahan tersebut menjadi lahan tidur, pasca konflik Ambon baru pihak Kepolisian memasang plang tanda petak tanah tersebut dikuasai oleh Kepolisian.



Grafik 2. Kepemilikan aset penghidupan berkelanjutan Desa Morodemak

pendahulu mereka yang bisa membuat mereka selamat dari gangguan roh dan penyakit.

## POLA MIGRASI

### Desa Kawa

Desa Kawa (Kenegerian Kawa) adalah desa adat yang memiliki sejarah panjang migrasi dan telah berhubungan lama dengan Kenegerian lain sejak sebelum jaman penjajahan. Negeri Kawa atau Hena merupakan kumpulan dari marga-marga yang kemudian berkumpul menjadi marga, (1) Soa Ely; terdiri dari marga Ely, Kiwe, Rotasouw dan (2) Soa Nurue; terdiri dari marga Rotasouw, Nurue, Lessy<sup>3</sup>. Orang Buton mulai masuk Desa Kawa diperkirakan sejak tahun 1600-an.

Masyarakat Desa Kawa, baik orang adat dan penghuni adat memiliki karakter menetap. Asal mula dusun Kawa pun jika dilihat dari sejarahnya berasal dari masyarakat dataran tinggi, peramu dan pekebun ladang, yang kemudian datang ke pantai disebabkan oleh gangguan roh, yang menurut tetua mereka mengharuskan penduduk untuk turun ke arah pantai.

Dari sejarah yang tidak boleh dituliskan itu (menurut Hamzah, jika sejarah dituliskan akan hilang tuahnya dan berhenti menjadi sejarah yang diikuti oleh masyarakat) masyarakat percaya bahwa tanah Desa Kawa yang ada sekarang adalah tanah pilihan

Jika dilihat dari sisi pekerjaan yang sebagian besar nelayan dan pekebun dari karakteristik lokasi hunian, maka dapat dilihat perwujudan desa dan dusun-dusun sejak awal hunian memiliki orientasi hunian permanen dan dekat dengan tempat kerja. Dalam perencanaan tata guna lahan pun masyarakat telah menetapkan lokasi-lokasi yang berhubungan dengan orientasi lokasi hunian, terutama dalam menetapkan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, lapangan olah raga.

Fasilitas publik dan ruang publik sebagai tempat interaksi antar individu atau kelompok dalam Setiawan dan Barret (2016) dapat menjadi jembatan dalam pemulihan pasca konflik. Dalam konteks Desa Kawa apa yang disebut sebagai *'heritage economy'* seperti panen cengkeh bersama dapat kembali dijadikan.

Sedangkan dari sisi aktivitas masyarakat kegiatan tahunan yang membuat masyarakat untuk melakukan migrasi keluar adalah panen cengkeh di Piru, yang berjarak sekitar 30 km dari Desa Kawa. Panen cengkeh ini terutama ramai dikunjungi oleh orang Buton, yang menjadi pemilik kebun cengkeh di daerah Seram Barat, termasuk kecamatan Piru. Namun ikatan kultural pela yang biasanya bisa menjembatani antar kerabat yang berbeda marga, identitas agama, sejak terjadinya konflik Ambon membuat

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Hamzah, mantan Raja Kawa, sebutan raja dalam wilayah kenegerian sama

dengan kepala desa dalam administrasi wilayah NKRI, 20 Oktober 2015.

masyarakat tersegregasi atas identitas agama. Konflik agama ini juga yang membuat budaya gotong royong dalam panen cengkeh menjadi berkurang.

Akibat konflik lainnya adalah lahan-lahan yang dipersiapkan untuk pengungsi, untuk menerima kerabat korban konflik berdasarkan pela (ikatan kekerabatan berdasarkan perkawinan saudara laki-laki) gandong (ikatan kekerabatan berdasarkan geneologis desa/hena), dan famili (hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan marga/fam)<sup>4</sup>. Persiapan lahan ini diakui oleh Hamzah sebagai salah satu cara untuk membantu saudara mereka sesuai dengan ikatan adat di atas. Migrasi ke dalam muncul

dalam periode 1999 hingga 2007 untuk menampung para pengungsi ini, namun bersifat sementara, sampai rekonsiliasi terjadi. Rekonsiliasi pertama terjadi di tahun 2007<sup>5</sup> dilakukan di hutan adat, yang pengelolaannya milik marga-marga yang saling berhubungan antar hena/desa dan menjadi sumber daya milik bersama.

Dampak lanjutan dari konflik ini adalah terbatasnya ekspansi lahan bagi perkebunan cengkeh dan coklat bagi petani Buton dari Buton dan daerah kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Tabel 5. Karakteristik pilihan lokasi hunian Desa Kawa

Karakteristik pilihan lokasi hunian	
1. Pilihan orientasi arah rumah Cahaya matahari	: Cukup, rumah yang ada menghadap ke arah jalan-jalan, yang membentuk grid dan blok-blok permukiman
Kemudahan sirkulasi menuju tempat kerja	: Iya, dengan mayoritas masyarakat Buton yang masih memiliki rumah panggung, dan berdekatan dengan pantai/dermaga tambat perahu.
Kemudahan menambat perahu	: Masyarakat pekebun Desa Kawa memiliki lokasi usaha yang jauh dari permukiman. Rata-rata dusun sagu dan kebun campur berjarak lebih dari dua kilometer dari permukiman.
Kemudahan menghadapi bencana	: Ya, jarak rata-rata permukiman dengan tambatan perahu terjauh 700 meter
Adat	: Ya, pohon kelapa dan ketapang yang menjadi sekat antara ruang terbuka pantai dan permukiman, sekaligus menahan badai tahunan
	: Ya, dari sisi tata letak rumah dan pembagian ruang, baik di luar dengan adanya walang (bale-bale) di setiap rumah dan dua ruang penerima tamu, memperlihatkan kualitas komunikasi antara tamu dengan penghuni rumah.

<sup>4</sup> Untuk penjelasan lebih jauh tentang konflik dan rekonsiliasi berdasarkan kearifan lokal ini bisa melihat Wakano, Abidin. 2009. Dampak Konflik Maluku: Studi Konflik dan Kekisruhan pada Pengungsi Iha, Kayu Tiga dan, Seriholo dalam *Agama Dan Pergeseran Representasi: Konflik Dan Rekonsiliasi Di Indonesia*, Penerbit Wahid Institute

<sup>5</sup> Menurut Hamzah, rekonsiliasi yang diinisiasi pemerintah tidak pernah berhasil mendamaikan pihak yang bertikai, rekonsiliasi baru tercapai setelah semua pihak merasakan kebutuhan perdamaian, terutama ketika sumber penghidupan mereka, hutan dan kebun campur tidak bisa diolah karena perang, 20 Oktober 2015.

Tabel 6. Lanjutan

Karakteristik pilihan lokasi hunian	
2.	Pilihan bahan bangunan yang digunakan
	Awet : Ya, khusus untuk dusun Pohon Batu, pemilihan material rumah tergantung dari status ekonomi.
	Mudah dicari : Ya, sebagian besar balok rumah menggunakan kayu kelapa.
	Mudah dipelihara : Ya
3.	Arsitektur
	Tradisi : Tidak, kecuali di dusun Pohon Batu. Dalam hal pembagian ruang, dapur terpisah dengan rumah inti di dusun Waeyaho.
	Tren : Ya
	Kebutuhan ruang : Ya
	Kebutuhan privasi : Ya
4.	Konstruksi yang digunakan
	Tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim : Ya
	Tahan akan gangguan luar/binatang buas : Ya, pola permukiman yang berbentuk grid di dalam permukiman dikelilingi oleh kebun-kebun pekarangan di halaman belakang yang cukup luas, dengan gerbang desa yang cukup jauh dari pusat permukiman, sekitar 1 km.
	Tahan untuk generasi mendatang : Lokasi pertama dari gerbang desa adalah fasilitas sekolah dan pasar sementara. Baru terdapat rumah-rumah dengan pekarangan depan dan belakang yang cukup luas. Ya, pembangunan rumah sekarang menggunakan bahan campuran antara bata dan semen, serta kayu. pilihan ini tergantung tingkat ekonomi rumah tangga bersangkutan.
	Dapat diubah per bagian : Ragu, kemungkinan perubahan adalah perluasan horizontal untuk rumah tumbuh.
	Kebutuhan tinggal sementara : Tidak, semua rumah dibangun secara permanen dengan material yang tersedia.

### Desa Morodemak

Migrasi sementara yang terjadi di Morodemak terutama disebabkan kehadiran para anak buah kapal (ABK) dari daerah sekitarnya, seperti Tegal, Kudus dan Rembang. Kehadiran pendatang ini bersifat sementara, namun dalam

intensitas yang sering. Akibat penyempitan lahan untuk kawasan permukiman, generasi kemudian di desa ini memilih tinggal di luar desa, walaupun masih dalam satu kecamatan Bonang.

Tabel 7. Karakteristik pilihan lokasi hunian Desa Morodemak

Karakteristik pilihan lokasi hunian		
1.	Orientasi arah rumah	: Tidak, rumah lebih mementingkan sirkulasi udara dan kebutuhan untuk menampung air, sehingga walaupun padat namun jarak antar rumah tetap dijaga (sekitar 50 cm). Hal ini menurut warga untuk menjaga sirkulasi udara, di samping adanya talang air untuk menampung curahan air hujan ke bak penampungan di dalam dan luar rumah.
	Cahaya matahari	: Tidak, rumah lebih mementingkan sirkulasi udara dan kebutuhan untuk menampung air, sehingga walaupun padat namun jarak antar rumah tetap dijaga (sekitar 50 cm). Hal ini menurut warga untuk menjaga sirkulasi udara, di samping adanya talang air untuk menampung curahan air hujan ke bak penampungan di dalam dan luar rumah.
	Kemudahan sirkulasi menuju tempat kerja	: Ragu, kecuali untuk yang berpenghasilan nelayan, desa ini cukup jauh untuk orang yang memiliki pekerjaan di luar profesi nelayan. Dari ibukota kabupaten desa ini berjarak sekitar 12 km.
	Kemudahan menambat perahu	: Ya, terdapat dermaga di sepanjang sungai utama
	Kemudahan menghadapi bencana	: Tidak, masyarakat desa terbiasa dengan rob setiap bulan yang biasa merendam 50 cm permukiman. Penataan permukiman dan ruang terbuka hijau tidak dilakukan oleh masyarakat, hampir seluruh ruang terbuka ditutup semen dengan saluran yang sempit.
	Adat	: Tidak, semua rumah yang dibangun mengikuti tren masa kini, kecuali beberapa bangunan tua yang belum direnovasi (karena keterbatasan dana).
2.	Bahan bangunan yang digunakan	: Ya, bahan bangunan yang digunakan seluruhnya dari bata dan semen.
	Awet	: Ya, bahan bangunan yang digunakan seluruhnya dari bata dan semen.
	Mudah dicari	: Ya, jumlah penjual toko bahan bangunan banyak
	Mudah dipelihara	: Ya, dengan adanya banjir rob, beberapa bangunan baru terlihat menggunakan <i>finishing</i> keramik untuk dinding, guna memudahkan pembersihan.
3.	Arsitektur	: Tidak, bangunan baru mengikuti tren dan pemanfaatan keterbatasan lahan.
	Tradisi	: Tidak, bangunan baru mengikuti tren dan pemanfaatan keterbatasan lahan.
	Tren	: Ya
	Kebutuhan ruang	: Ya
	Kebutuhan privasi	: Tidak, ruang rumah yang sempit menyebabkan masyarakat cuma memiliki satu ruang serbaguna untuk menerima tamu, makan, dan tidur dengan kasur lipat.
4.	Konstruksi yang digunakan	: Ya
	Tahan terhadap perubahan cuaca yang ekstrim	: Ya
	Tahan akan gangguan luar/binatang buas	: Tidak, karena jauh dari lokasi tambak. Kemungkinan binatang buas yang menyalur ke permukiman adalah ular sanca.
	Tahan untuk generasi mendatang	: Ya
	Dapat diubah per bagian	: Ragu, kemungkinan rumah diperluas hanya dengan pembangunan vertikal
	Kebutuhan tinggal sementara	: Ya, untuk sebagian rumah sewa, dibangun dengan material dan konstruksi seadanya.

Jika dilihat dari sejarah pembentukan desa, yaitu komunitas nelayan yang bertempat tinggal bersama-sama (*moro*) dekat dengan tempat mereka melaut, maka pola migrasi yang berlangsung masih sama, yaitu adanya penduduk musiman yang datang secara intens dan berkala. Perubahan yang terjadi justru karena penyempitan lahan wilayah permukiman, hal ini mendorong terjadinya migrasi ke luar desa untuk mencari permukiman yang lebih layak.

Walaupun Desa Morodemak 90% memiliki lahan terbuka yang terdiri dari tambak dan hutan Mangrove, namun masyarakat memilih untuk pindah ke luar desa disebabkan mata pencaharian generasi yang lahir kemudian (lahir tahun 1990-an) bukan nelayan atau petambak. Di samping itu, lahan-lahan yang ada tidak lagi dimiliki sebagian besar masyarakat, namun investor dari luar desa. Bagi sebagian warga desa tanpa lahan ini, mempertahankan tambak merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan mereka dengan bekerja di tambak-tambak orang lain.

### Strategi Adaptasi

Konversi dan diversifikasi penggunaan lahan, perubahan komoditas di Desa Kawa dan Morodemak memiliki skenario yang berbeda. Perubahan ini dapat dilihat dengan melihat cara

masyarakat mempertahankan kehidupannya. Di Desa Kawa strategi adaptasi dilakukan oleh pendatang dari Buton dengan mengubah komoditas kelapa dan cengkeh, menjadi coklat karena dianggap lebih menguntungkan. Sedangkan secara geografis orang adat semakin meneguhkan posisi teritorial mereka dengan penetapan sasi darat dan laut.

Penetapan sasi darat yaitu larangan memanen tumbuhan atau membuka lahan jika tidak sesuai musim untuk menjaga kebersamaan. Sedangkan sasi laut yang berlangsung selama 2 tahun dan dibuka selama satu bulan, untuk wilayah tangkap 300 meter dari bibir pantai adalah cara orang adat untuk mempertahankan kualitas stok ikan dari penangkapan yang berlebihan dan menjaga suksesinya.

Sedangkan masyarakat Desa Morodemak lebih banyak memanfaatkan keunggulan sumber daya alam mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka sebagai petambak, sehingga luasan tambak dipertahankan, sedangkan kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hunian menjadi prioritas kesekian. Peningkatan aksesibilitas komunikasi dan transportasi publik di kawasan perdesaan menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk melakukan migrasi keluar desa.

Tabel 8. Pilihan strategi adaptasi

Strategi Adaptasi Desa Kawa	
Aspek Penghidupan Berkelanjutan	Aspek sosial dan sumber daya alam merupakan aspek terpenting yang dipertahankan masyarakat adat Desa Kawa untuk menghadapi perubahan lingkungan dan perubahan sosial.
Aspek Pertambahan Populasi	Perubahan populasi karena migrasi dibatasi sejak konflik Ambon tahun 1999.  Perubahan dalam migrasi musiman, dari panen cengkeh bersama, menjadi tidak ada.
Aspek Geografis	Rencana tata guna lahan ( <i>land use planning</i> ) dilakukan dengan mencadangkan kawasan permukiman untuk generasi mendatang.  Pemberian lahan (hak milik dan hak pakai) kepada pendatang sejak konflik Ambon mulai berkurang.
Aspek Sosial-Kultur	Secara sosial masyarakat terikat oleh aturan pela, gandong, dan famili. Hal ini juga yang menyebabkan adanya penerimaan atau penolakan pengungsi.  Secara budaya, masyarakat Desa Kawa adalah masyarakat terbuka, ini bisa dilihat dari harmoninya masyarakat adat dengan pendatang dari Buton sejak jaman tahun 1600 dan transmigran Jawa sejak Orde Baru.



Tabel 9. Lanjutan

Strategi Adaptasi Desa Morodemak	
Aspek Penghidupan Berkelanjutan	Aspek sumber daya alam, terutama lahan tambak adalah aspek terpenting yang dipertahankan masyarakat. Aspek penghidupan berkelanjutan yang lain rentan terhadap perubahan, terutama bagi nelayan miskin yang tidak memiliki perahu atau lahan tambak, hal ini disebabkan mereka tidak memiliki aset yang sama dengan aktor lain untuk melakukan mobilisasi sumber daya bagi perbaikan kehidupan Membentuk kembali sumber daya bersama, yaitu sempadan sungai sebagai <i>mixed used</i> , dan sungai dan kawasan tambak sebagai daerah penyangga, habitat satwa, dan destinasi wisata.
Aspek Pertambahan Populasi	Perubahan populasi terjadi karena masyarakat yang tidak lagi bermata pencaharian nelayan dan memilih pindah karena memiliki kemampuan untuk mendapatkan hunian lain di luar desa yang lebih sehat.
Aspek Geografis	Rencana tata guna lahan ( <i>land use planning</i> ) tidak memerhatikan kondisi permukiman yang lebih baik dan adaptif terhadap bencana rob, masyarakat malah menggosur sempadan sungai untuk perluasan rumah, yang menyebabkan genangan rob yang terjadi berlangsung lebih lama, dari tahun ke tahun.
Aspek Sosial-Kultur	Secara kultural masyarakat memiliki sikap terbuka dan menerima pendatang, baik musiman maupun yang ingin menetap atau memiliki lahan tambak sebagai investor.

Jika melihat model Ostrom (2006) mengenai sumber daya bersama, maka terlihat bahwa pengaturan sumber daya bersama masih bisa menciptakan tertib sosial, memiliki dampak positif pada penghidupan berkelanjutan, seperti yang terjadi di Desa Kawa. Di desa ini walaupun terdapat kesenjangan antar masyarakat, namun secara sosial mereka mampu menciptakan jaring pengaman sosial lewat aturan adat, sehingga kebutuhan mendasar seperti pangan, papan, dan sandang bisa dicukupi dan diusahakan secara sosial.

Masalah aprioritas seperti eksternalitas teknologi terjadi di Desa Morodemak, yaitu konflik alat tangkap. Masalah ini dalam konteks mitigasi, tidak terjadi di Desa Kawa yang menyiapkan aturan main sasi yang bisa dibaca sebagai strategi ekonomi-politik bagi orang adat yang masih menggunakan teknologi alat tangkap tradisional jika dibandingkan pendatang dari Buton yang menggunakan alat tangkap modern dan armada yang lebih besar, terutama dalam penangkapan ikan pelagis.

Masalah penggunaan lainnya adalah dalam konteks spasial, lahan-lahan tambak Desa Morodemak memiliki kualitas yang berbeda, sehingga lahan-lahan yang terbentuk akibat sedimentasi dan terabrasi, harga sewanya lebih

kecil dibandingkan lahan-lahan yang terbentuk dari pembukaan hutan Mangrove.

Produksi yang menurun, lahan tambak yang marjinal disiasati dengan penanaman kembali Mangrove. Di samping itu masyarakat Desa Morodemak mulai menemukan kembali sumber daya milik bersama mereka, yaitu sungai-sungai yang selama ini diokupasi untuk permukiman, bangunan liar untuk warung, dan dibiarkan menjadi 'sungai sampah'. Pada awalnya sungai sampah ini terbentuk karena masyarakat merasakan manfaat untuk kebersihan sungai ini hanya untuk pemilik tambak, namun seiring dengan kasus malaria, akibat hilangnya lahan tambak dan genangan air di permukiman akibat saluran mampat, masyarakat mulai menyadari fungsi sungai, dan kembali menganggapnya sebagai sumber daya bersama, begitu juga 'kawasan Mangrove' yang tersisa, dijadikan ruang bersama dan dinikmati jasa lingkungannya, sebagai wilayah penyangga, tempat pembibitan, habitat burung, dan habitat kepiting lumpur, serta menjadi destinasi wisata.

Persoalan pembentukan 'sumber daya bersama' seperti yang ingin dilakukan pemerintah Pusat untuk mengatur nelayan agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan terbentur pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti dalam karakteristik

yang diberikan Ostrom (2009) dan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Woodward dan Collin-Costilo (2015), Fischer (2018), Mujio *et al.*, (2016) yang menyatakan pengaturan swakelola (*self governance*) dipengaruhi oleh faktor kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembuatannya, menimbang kondisi biofisik, keragaman, dan unsur ketidakpastian. Ini dapat dilihat dari penolakan masyarakat di pesisir Utara Jawa, dan bagian lain dari Indonesia terhadap aturan main yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggunakan alat yang ramah lingkungan, justru karena keragaman sosial ekonomi nelayan, persaingan antar nelayan yang tidak adil, ketidakpastian dalam peneguhan sanksi pelanggaran, dan adanya 'jalur ikan' di luar teritorial desa, dimana nelayan dari desa lain bisa mencegat ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.<sup>6</sup>

Sebaliknya sumber daya bersama 'terbentuk' dari perubahan bentang alam dan kebutuhan membentuk kembali ruang bersama dengan penggunaan campuran (*mixed used*) di sempadan sungai yang selama ini dikuasai privat untuk warung atau WC umum, menjadi domain publik untuk menjemur ikan, tempat bermain anak, tempat bercengkerama waktu sore dan malam hari, terjadi di desa Morodemak.

## KESIMPULAN

Kondisi wilayah seperti perubahan ekologi dan populasi menyebabkan masyarakat membentuk kembali aturan main, termasuk di dalamnya yaitu pembatasan terhadap penggunaan sumber daya bersama yang mereka miliki lewat teknologi (alat tangkap) seperti di Desa Morodemak dan strategi teritorialisasi (penandaan geografis) di Desa Kawa. Hal ini dimaksudkan untuk tetap bertahan dan sebagai strategi keberlangsungan penghidupan berkelanjutan.

Konsep sumber daya bersama bisa dibentuk ulang seperti kasus Morodemak dalam pengaturan sempadan sungai. Pembentukan

sumber daya bersama yang relatif baru ini didasarkan oleh perubahan ekologi yang merugikan seluruh masyarakat sebagai kesatuan sosial. Kesadaran ini terbentuk lebih sebagai respon atas permasalahan yang mereka hadapi bersama.

## SARAN

Pengaturan lain seperti meningkatkan kualitas ruang publik sebagai media interaksi dibutuhkan untuk memperkuat modal sosial, terutama di daerah pasca konflik. Ruang publik di Desa Kawa ada di masing-masing dusun, namun ruang publik bersama ada pada aktivitas sehari-hari dalam interaksi di kebun dan pasar. Kekhawatiran mengenai tersingkirnya Orang Adat dalam berbagai aktivitas ekonomi dapat dimediasi oleh pengaturan di pasar, termasuk mempertahankan sistem pertukaran tradisional jika masih berlaku. Hal ini seperti yang disarankan dalam Scoones (1998) bahwa intervensi dalam berbagai institusi formal dan non formal perlu dipelajari untuk mengembangkan strategi penghidupan yang berkelanjutan.

Sedangkan di Desa Morodemak penguatan modal sosial dalam ruang publik mestinya lebih banyak dilakukan di sempadan sungai yang tersisa sebagai *mixed use area* ketika persoalan-persoalan sehari-hari dapat dibicarakan dan konflik dapat dimediasi secara cepat karena informasi dapat lebih terbuka dan menjangkau banyak orang.

## TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kolega di Pusat Pengkajian Perencanaan Pembangunan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor, Dr. Siti Nurisjah, Dr. Candraningratri Ekaputri Widodo, Galuh Syahbana Indraprahasta, Ray March Syahadat, Priambudi Tri Putra, Reza Setia Raharja Putra, yang telah berbagi catatan dan berdiskusi dalam tulisan

<sup>6</sup> Nelayan-nelayan dari Tegal dan Indramayu menurut nelayan Morodemak paling sering melanggar batas

teritorial pesisir Morodemak dan menghabiskan ikan dengan alat tangkap pukat yang kini dilarang.

yang sebagian merupakan hasil dari penelitian tentang permukiman nelayan, Sekaya Maritim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D. S., Rachmawati, L., Sofyanto, H. & Hamilton-Hart, N. (2016). Green market for small people: Markets and opportunities for upgrading in small-scale fisheries in Indonesia. *Marine Policy* 63(2016), 198–205
- Alland Jr, A. (1975). Adaptation. *Annual Review of Anthropology* 4(1975), 59-73.
- Ashley, C. & Carney, D. (1999). *Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience*. London: DFID
- Colin-Castillo, S. & Woodward, R. T. (2015). Measuring the potential for self-governance: an approach for the community-based management of the common-pool resources. *International Journal of the Commons* 9(1), 281–305
- DFID. (2001). *DFID Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. [www.enonline.net/dfidsustainableliving](http://www.enonline.net/dfidsustainableliving)
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press
- Fabinyi, M. (2018). Environmental fixes and historical trajectories of marine resource use in Southeast Asia. *Geoforum* 91 (2018), 87-96
- Fischer, A. P. (2018). Pathways of adaptation to external stressors in coastal natural-resource-dependent communities: Implications for climate change. *World Development*, in press
- Hardesty, D. L. (1977). *Ecological Anthropology*. New York: Mc Graw-Hill.
- Harvey, D. (1989). *The Condition of Postmodernity*. London: SAGE Publications Ltd.
- Harvey, D. 2010. *Imperialisme Baru: Geneologi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book
- Haryono, T. J. S. (2005). Strategi Kelangsungan Hidup Nelayan: Studi tentang diversifikasi pekerjaan keluarga nelayan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan kelangsungan hidup *Berkala Ilmiah Kependudukan*. 7(2), 119-128
- Kanas, A., Scheepers, P. & Sterkens, C. (2017). Positive and negative contact and attitudes towards the religious out-group: Testing the contact hypothesis in conflict and non-conflict regions of Indonesia and the Philippines. *Social Science Research* 63 (2017), 95-110
- Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. (2016). *Laporan Akhir Penyusunan Data Dasar Program Sekaya Maritim dan Pengembangan Model Permukiman di 10 Lokasi Prioritas*
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Arruz Media
- Kusnadi. (2000). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press
- McCarthy, J. J., Canziani, O. F., Leary, N. A., Dokken, D. J., & White, K. S. (Eds.). (2001). *Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press
- Magis, K. (2010). Community resilience: an indicator of social sustainability. *Society & Natural Resources* 23(5), 401–416
- Mujio, Adrianto, L., Soewardi, K. & Wardiatno, Y. (2016). Analisis potensi konflik pemanfaatan ruang kawasan pesisir: integrasi rencana tata ruang darat dan perairan pesisir. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus* (2016), 139-144.
- Nurcahyanti, E. E., Surjono, & Kurniawan, E. B. (2010). Penataan Permukiman Nelayan Puger Ditinjau Dari Aspek Kekumuhan dalam *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(2), 41-48.

- Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1994). *Rules, Games, and Common-Pool Resources*. The University of Michigan Press
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social ecological systems. *Science* 325(5939), 419–422
- Sahlins, M. D. (1968). Culture and Environment: The Study of Cultural Ecology. *Theory in Anthropology A Sourcebook*. R. Manners & D. Kaplan (Eds.) Chicago: Aldine.
- Setiawan, W. & Barrett, P. S. (2016). The built environment element of economic development in post conflict response in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 234 (2016), 478-487
- Scoones, I. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods A Framework for Analysis*. IDS Working Paper 72. Institute of Development Studies
- Wakano, A. (2009). Dampak konflik Maluku: studi konflik dan kekisruhan pada pengungsi Iha, Kayu Tiga dan, Seriholo. *Agama dan Pergeseran Representasi : Konflik dan Rekonsiliasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Wahid Institute